

**PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DALAM MENGIMPLEMENTASI PROGRAM KB PRIA
(MOP) DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013**

NOVRI YENTI

Email : ranov8884@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 - 63277

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Family Planning Agency and Women's Empowerment in implementing the family planning program in Kampar regency Gentlemen. As for the background of this research is not yet achieved the target of family planning acceptors Men in Kampar regency and the condition of the lack of information about family planning in Kampar regency Gentlemen. This study uses a qualitative method of data collection techniques by means of in-depth interviews and the use of libraries as well as qualitative descriptive data analysis. The necessary data, among others; primary data obtained through interviews and secondary data obtained through library research on issues related to this study. Based on the survey results revealed that the role BKBPP Kampar district in implementing the family planning program is to make efforts male socialization and continuous coordination with Government agencies, but to socialize Men specific family planning program is not yet done. The factors that affect BKBPP in implementing the family planning program of Men is a factor of limited human resources, limited means of supporting and budget constraints factor

Keywords : Implementation, MOP, Role , Agencies

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, sebagai langkah penting pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Program Keluarga Berencana tersebut diarahkan untuk mengupayakan pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana yang berkualitas.

Pembangunan program keluarga berencana tersebut merupakan program lintas sektoral, yang saling bersinergi antar bidang/sektor terkait. Tantangan baru dalam pengendalian penduduk tidak hanya sebatas pengendalian kelahiran saja melainkan mencakup penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

Program Keluarga Berencana yang telah berjalan selama ini mengharapkan adanya dukungan dan harmonisasi antara kebijakan di bidang pengendalian penduduk

dengan kebijakan pembangunan di bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi, dan sinergis baik secara vertikal maupun horizontal sehingga pembangunan keluarga berencana yang merupakan bagian dari 5 (lima) Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar dapat diwujudkan.

Hal yang menarik dari perjalanan panjang Program Keluarga Berencana di Indonesia seiring dengan diratifikasinya Deklarasi Kairo (ICPD) yang antara lain berisi tuntutan keadilan dan kesetaraan gender, ternyata tingkat kesertaan ber-KB secara umum masih didominasi oleh perempuan. Sedangkan pada laki-laki/pria tingkat kesertaannya masih sangat rendah (kurang dari 6%) dari jumlah total Peserta KB Aktif (PA) yang ada atau kalau dibandingkan secara proporsional persentase kesertaan pria dan wanita sangat tidak proporsional. Sumbangan terbesar dan yang mempunyai dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah pengguna alat kontrasepsi jangka panjang yang salah satunya adalah Medis Operasi Pria (MOP), atau dengan bahasa lain tingkat kesertaan KB Pria masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian serius.

Rendahnya kesertaan KB Pria (MOP) merupakan eksekusi dari minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait, sehingga KB Pria dianggap sebagai program aneh dan tabu. Walaupun pada tahun 2013 BKBPP telah menyusun program Pelayanan Komunikasi dan Edukasi (KIE) KB namun kegiatan ini belum menyentuh masyarakat secara luas

karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan melalui pesan-pesan gambar berupa baliho dengan jumlah yang sangat terbatas (7 unit) dan alokasi anggaran sejumlah Rp. 149,100,000,- dengan target sasaran MOP 1567 akseptor.

Berdasarkan uraian tersebut berikut identifikasi masalah yang penulis ajukan dalam melihat implementasi Program KB Pria (MOP) sebagai upaya penataan kependudukan di Kabupaten Kampar.

1. Rendahnya sosialisasi dan penyuluhan diduga menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian target akseptor KB Pria (MOP)
2. Masih terbatasnya pilihan alat kontrasepsi yang tersedia bagi pria
3. Secara administratif program ini bukan program prioritas BKBPP Kabupaten Kampar.
4. Persoalan teknis (tenaga medis, alat medis, sarana dan prasarana) belum memadai.

Penataan kependudukan terutama dalam peningkatan kesertaan KB Pria (MOP) merupakan kebijakan strategis dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kampar. Rendahnya kesertaan KB Pria tentu dipandang sebagai wujud *failed policy* pemerintah sehingga perlu mendapat perhatian serius, dan studi ini dimaksudkan untuk melakukan kajian mengenai program KB Pria tersebut dengan judul; **Peranan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengimplementasi Program KB Pria (MOP) di Kabupaten Kampar Tahun 2013.**

PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari beberapa identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah peran BKBPP dalam mengimplementasi Program KB Pria (MOP) di Kabupaten Kampar tahun 2013?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi BKBPP dalam mengimplementasi Program KB Pria (MOP) di Kabupaten Kampar tahun 2013?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui peran BKBPP dalam mengimplementasi Program KB Pria (MOP) di Kabupaten Kampar tahun 2013.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran BKBPP dalam mengimplementasi Program KB Pria (MOP) di Kabupaten Kampar tahun 2013.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah;

1. Diharapkan secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pengampu kebijakan terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan program khususnya dalam peningkatan kesertaan KB Pria atau MOP di Kabupaten Kampar.
2. Secara akademis diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian terkait serta sebagai bahan informasi ilmiah khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

TEORI

a. Tinjauan Tentang Program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (PP No 21). Program Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan sangat penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan Keluarga Berencana didasarkan atas adanya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (2,1%) untuk tahun 1961-1971, struktur umur yang kurang menguntungkan yaitu kelompok umur usia muda (0-14 th) relatif besar (42,1 %). Disamping itu persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak seimbang sekitar 60% penduduk berdiam di pulau Jawa dan Bali serta angka kelahiran total (FTR) pada tahun 1971 sebesar 4,3 % (BKKBN 1993).

Dengan kondisi tersebut maka langkah konkrit yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968 yang berstatus sebagai lembaga semi pemerintah dan berfungsi mengembangkan keluarga berencana dan mengelola segala jenis bantuan untuk keluarga berencana di Indonesia. Pada tahun 1970 dengan SK Presiden No.8 tahun 1970, LKBN ditingkatkan statusnya menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berstatus sebagai lembaga

pemerintah Non Departemen. Maka sejak saat itu telah dimantapkan adanya pelaksanaan Program KB Nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program KB, maka perkembangan kebijaksanaan dituangkan didalam GBHN seperti halnya didalam tahun 1973 disebutkan bahwa agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana, yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan keluarga berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang. Pelaksanaan keluarga berencana ditempuh dengan cara-cara sukarela, dengan pertimbangan nilai agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Usaha Pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diperluas dan diintensifkan melalui Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mempercepat perwujudan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BKKBN JATIM, 1995). Dengan makin berkembangnya pelaksanaan Gerakan KB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, maka secara nasional komitmen politis telah mensahkan Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Sejahtera.

Komitmen politis telah diperjelas dalam GBHN tahun 1993 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Keluarga Sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan (BKKBN, 1995). Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara menurunkan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga. Gerakan Keluarga Berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan.

Dalam usaha meningkatkan pemeriksaan keluarga berencana nasional peranan pria sangat penting dan menentukan. Sebagai kepala keluarga pria merupakan tulang punggung keluarga dan selalu terlibat untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan (Manuba, 1998).

b. Tinjauan Tentang Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi

dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan (Eddy Wibowo, 2005: 70).

Untuk mengkaji implementasi kebijakan menurut Syukur ada tiga unsur penting dalam proses implemementasi yaitu, 1. Adanya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, 2. Target group, 3. Unsur pelaksana (Syukur, 1986:396). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/ penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/ hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Tangkilisan, 2004:9).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok variabel, yaitu 1. Karakteristik dari masalah, 2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang, 3. Variabel lingkungan (Subarsono, 2005:94). Efektivitas implementasi kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi dimasyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan

harapan pemerintah berarti implementasi tidak efektif. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bambang Sugono (1994:143), yaitu:

“Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian perilaku atau perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif”.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi Program KB Pria (MOP) dalam upaya penataan kependudukan di Kabupaten Kampar ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat dan mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah yang terjadi secara empirik.

Penelitian kualitatif dipilih dikarenakan cara menggambarkan fenomena melalui hubungan antar variabel dapat menjawab rumusan penelitian mengenai implementasi Program KB Pria (MOP) dalam upaya penataan kependudukan di Kabupaten Kampar.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang implementasi Program KB Pria (MOP) dalam upaya penataan kependudukan di Kabupaten Kampar dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kampar.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait dengan implementasi Program KB Pria (MOP) dalam upaya penataan kependudukan di Kabupaten Kampar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi untuk mengetahui implementasi Program KB Pria (MOP) dalam upaya penataan kependudukan di Kabupaten Kampar. Teknik pengambilan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling technique*. *Purposive sampling technique* adalah cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan tersebut.

GAMBARAN UMUM BKBPP KAMPAR

1. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012, Pasal 92 dan 93 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok: **“Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas**

Pemerintahan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, dan mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 ayat (2) point a sampai dengan j.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BKBPP Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. 1 (satu) Kepala Badan atau (eselon IIb)
2. 1 (satu) Sekretaris (IIIa), membawahi 3 (tiga) Sub Bagian (eselon IVa);
3. 4 (empat) Bidang (eselon IIIb), masing-masing membawahi:
 - Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahi 2 (dua) sub bidang (eselon IV a)
 - Bidang Pembinaan Keluarga dan Bina Ketahanan Keluarga, membawahi 2 (dua) Sub Bidang (eselon IV a)
 - Bidang Advokasi dan Bina Lini Lapangan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang (eselon IV a)
 - Petugas Fungsional (PLKB) yang bertugas di Kecamatan/desa/Kelurahan, dan
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang saat ini belum dapat dipenuhi.

Perkantoran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kampar berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Kode Pos 28412 Kabupaten Kampar.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi BKBPP Kabupaten Kampar yaitu menjalankan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKBPP Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Menyusun program kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Menyelenggarakan program/kegiatan dan pelayanan KB dan KS, Kespro serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang kependudukan, di bidang KB dan KS serta

PP dan PA; sebagaimana yang diatur dalam pasal 93 ayat (2) huruf a s/d j dalam Perda No 6 Tahun 2012.

4. Kondisi Sumber Daya Kepegawaian

a. Pegawai Struktural

Jumlah pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Desember 2013 terdiri dari;

- PNS Struktural dan staf umum sebanyak 25 orang
- PNS/ Staf fungsional sebanyak 87 orang
- Tenaga honorer sebanyak 10 orang
- Tenaga sukarela sebanyak 2 orang

Kondisi sebagaimana tersebut di atas bila merujuk pada sistem pola kerja dinilai belum mengacu pada pola maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa hampir seluruh pejabat eselon IV tidak mempunyai staf umumnya, selama ini dibantu oleh staf/tenaga honorer, idealnya setiap 1 pejabat eselon IV mempunyai dua orang staf umum. Jumlah tersebut dapat dirinci dengan kualifikasi pendidikan, kepangkatan dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan staf Kabupaten Kampar.

b. Pegawai Fungsional

Jumlah pegawai fungsional sebagai tenaga penyuluh (PLKB) lapangan pada tahun 2012 sebanyak 91 orang sampai dengan posisi 31 Desember 2013 sebanyak 87 orang, bertugas pada 21 Kecamatan dan masing-masing Kecamatan di koordinis oleh 1 (satu) orang koordinator.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. BKBPP dan Implementasi Program KB Pria di Kabupaten Kampar

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Catatan Sipil. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional. Selain itu, meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar diberikan tugas/amanah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintah daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

mewujudkan pembangunan bidang kependudukan yang seimbang. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pembangunan KB, PP dan PA tidak saja penting tetapi juga strategis untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, menghapus tindakan KDRT, kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka mendukung percepatan kesejahteraan rakyat yakni menghapuskan kemiskinan dan pengangguran menuju keluarga kecil berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar mengusung agenda 5 (lima) pilar Pembangunan Kabupaten Kampar sebagai suatu dimensi yang sangat urgen dalam pembangunan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen 5 (lima) pilar itu merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja yang sekaligus sebagai upaya nyata pemerintah terhadap pembangunan KB, PP dan PA.

Dilihat dari sisi pelaksanaan pelayanan KB, pembinaan dan pemberdayaan dan perlindungan anak, terdapat aparatur BKBPP sebagai pembina baik secara struktural dan fungsional yang memadai, sarana dan prasarana operasional lapangan menjadi modal dasar dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan BKBPP Kabupaten Kampar.

Pertumbuhan penduduk dan program keluarga berencana hingga saat ini belum menampilkan hubungan timbal balik sebagaimana diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang cenderung meningkat pada angka rata-rata 11% pertahun dan pasangan usia suburpun cenderung bertambah.

Peningkatan jumlah penduduk itu disadari sebagai ancaman dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melakukan antisipasi melalui peningkatan intensitas penyuluhan dan pelayanan KB pada masyarakat luas terutama masyarakat miskin, terisolir dan perbatasan sehingga program KB dan PP menjadi dambaan masyarakat yang mengakar.

BKBPP Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya mengimplementasikan program KB Nasional termasuk dalam hal ini KB Pria/MOP melakukan penyelerasan yang berkesesuaian dengan visi, misi dan program kerja kepala daerah terpilih. Mencermati konsep visi misi dalam rangka perwujudan dan pencapaian kinerja yang optimum, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar telah menetapkan program kegiatan sebagai berikut;

a. Program Keluarga Berencana :

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon bagi keluarga miskin; Sebagai upaya perwujudan pengendalian fertilytas penduduk berdasarkan angka kelahiran bayi hidup 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukan pada angka rata-rata 13.847 kelahiran bayi hidup per tahun, oleh karna itu dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar terbebas dari kemiskinan, maka penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin cukup memberikan makna dalam kehidupan sosial

masyarakat Kabupaten Kampar menuju keluarga kecil berkualitas. Kegiatan ini dilakukan melalui upaya penjangkaran bagi 3.500 PUS yang dilaksanakan di Kecamatan/Desa dan Kelurahan (Pelayanan KB Masy. Miskin Lampiran 5 dan 6)

2. Pembinaan Keluarga Berencana; Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan memotivasi serta penghargaan kepada PLKB, Kader Institusi Masyarakat Pendesaan dan peserta KB Lestari. Dan Pemerintah Kabupaten Kampar juga memberikan honorarium bagi seluruh PLKB, Koordinator dan penggerak momen pelayanan KB, serta alat Tulis Kantor untuk menunjang kegiatan PLKB di desa dalam Kecamatan Kabupaten Kampar. Pembinaan KB ini juga telah dapat disinergikan dengan TP-PKK Kabupaten pada kegiatan kesatuan PKK-KBKes yang dilaksanakan di Desa Kuok Kecamatan Kuok dan Peringatan Hari Keluarga Ke 20 Tahun 2013 bersamaan dengan kegiatan Baksos TNI Kes 2013. Dengan harapan Program KB Nasional yang selama ini terlupakan dapat bergaung kembali di tngah-tengah masyarakat.
3. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); Kegiatan ini di Implemtasikan sebagai upaya permasyarakatan Program KB melalui pesan-pesan gambar Baliho 7 (tujuh) unit yang dipajang pada tempat/lokasi strategis, hal ini dimaksudkan agar program KB

Nasional dapat memotivasi dan manfaatnya oleh masyarakat.

4. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya keberpihakan terhadap hak reproduksi individu masyarakat sebagai warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayan KB dalam bentuk Jamkesmas, Jampersal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan ini perlu di sosialisasikan terutama bagi petugas medis, koordinator/PLKB, Para kader KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan/Desa/Kelurahan; (42 Bidan; 21 PLKB; 105 Kader dan 252 PUS)

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan KB; Sebagai upaya peningkatan pencapaian sasaran program Pemerintah melalui BKKBN Pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran DAK untuk Pembangunan Balai Penyuluhan KB 6(enam) Unit dan melalui Dana APBD 1(satu) Unit pada 7(tujuh) Kecamatan, dan dilengkapi sarana mobiler memadai, dengan harapan fasilitas tersebut dapat bermanfaat dalam penggunaannya.

b. Program Pelayanan Kontrasepsi :

1. Pelayanan Konseling KB;

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan dan kualitas pelayanan KB, bagi para medis melalui kerjasama kemitraan antara BKBPP dengan Lembaga P2KS Provinsi Riau. Sehingga ketersediaan tenaga para medis dan PLKB dilapangan dapat memberikan

pelayanan yang optimal, mengingat pelayanan medis KB sampai 85 persen di daerah ditangani oleh bidan. Dari sejumlah bidan yang ada masih banyak tenaga bidan yang perlu ditingkatkan

praktik/keterampilannya dalam benk Pembinaan dan Pelatihan Tekhnis CTU, kepada 44 bidan medis dan diberikan sertifikat.

2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB;

Mengingat pelayanan KB yang telah berjalan selama ini adalah melalui klinik-klinik yang tersebar di 21 Kecamatan, dan telah melakukan penjangkaran dan menghimpun pendataan Akseptor/PUS, maka perlu didukung kelancaran tugasnya melalui penyediaan operasional klinik sebanyak 120 klinik yang mendapatkan dana operasional klinik.

3. Penyediaan Alat/sarana pemasangan kontrasepsi/obgyn bed;

Bahwa dari 120 klinik KB yang tersebar di 21 Kecamatan, tercatat 19 klinik yang tlah dilengkapi sarana obgyn bed. Pada tahun 2013 ini sesuai dengan ketersediaan anggaran hanya dapat disediakan sebanyak 20 Unit obgyn bed. Maka jumlah sarana obgyn bed s/d tahun 2013 sebanyak 29 Unit.

c. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri :

Program ini dilalukan melalui fasilitas Pembentukan Masyarakat peduli KB; dalam rangka memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat yang telah dibentuk dan

dibina pada tahun-tahun sebelumnya, perlu dilakukan pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi 40 orang pengelola UPPKS, serta penilaian dan bantuan sarana usaha, sehingga kelompok-kelompok usaha produktif yang telah tumbuh dimasyarakat tetap bergairah untuk melangkah menjadi pelaku wirausaha.

d. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

1. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat;
Keberhasilan program KB dan penggerakkannya harus meluas dan keseluruhan komponen dan elemen masyarakat salah satu diantaranya pembentukan PIK Remaja pada sekolah-sekolah SLTA sederajat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencerdas, motivasi dan membangun daya kreativitas remaja diluar kurikulum pendidikan, dilaksanakan pada saat siswa-siswi libur sekolah. Kegiatan ini diselenggarakan melalui beberapa rangkaian kegiatan kreatif dan orientasi program KRR yang melibatkan 160 orang peserta.
2. Pembinaan dan Pelayanan KB/KR;
Sebagai upaya keterpaduan gerakan program KB secara Nasional, telah menjadi komitmen bersama Pemerintah dalam hal ini TNI AD, BKKBN, Kementrian Kesehatan, untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk Bakti Sosial (TNI KB-Kes) baik Tingkat Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan Baksos TNI KB-Kes Kab. Kampar 2013 di Pusatkan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung, dibuka

secara resmi oleh Bupati Kampar yang dihadiri oleh masyarakat sekitar 1.500 orang, dalam rangkaian kegiatan “Pelayanan Kesehatan gratis, Pelayanan KB gratis, Donor Darah, serta kegiatan bazar produk-produk UPPKS, UP2K, PKK Kec/Desa dan PERSID Candrakirana KODIM 0313 KPR, serta hiburan rakyat melalui penggerkan sarana operasional MUPEN & MUYAN BKBPP Kab. Kampar. Dan pada kegiatan ini telah dapat menjaring Akseptor baru, untuk diberikan pelayanan secara gratis:

- *Implant 115 Akseptor; IUD 17 Akseptor; MOP 15 Akseptor; Kondom 10; Suntik 55 Akseptor dan Pil 32 Akseptor.*

3. Operasional kelompok Masyarakat peduli KB;
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka orientasi Program KB bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 50 orang se Kabupaten Kampar, kegiatan ini dapat diharap dapat memberikan motivasi dan KIE bagi Masyarakat di Kabupaten Kampar dan pemberian bantuan operasional kepada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yaitu Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), sebanyak 250 orang se Kabupaten Kampar. Hal tersebut dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas perpanjangan tangan bagi petugas lapangan KB.
- e. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Dalam rangka menjaga keutuhan penyelenggaraan program perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan jejaring melalui penguatan kader-kader yang dapat memelopori pencapaian sasaran program, dalam bentuk pembekalan pengetahuan, pemahaman program terhadap kader-kader BKB, BKR dan BKL melalui pelatihan bagi 50 Orang Kader.

Rendahnya partisipasi pria dalam menggunakan alat kontrasepsi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan organ reproduksi dan biologis pria, karena pengendalian kemampuan reproduksi pria lebih sulit dikendalikan sebab pria selalu dalam keadaan subur. Sedangkan faktor eksternal adalah terbatasnya alat KB bagi pria dan adanya mitos atau anggapan keliru dimasyarakat bahwa vasektomi atau sterilisasi pria bisa mempengaruhi libido pria dan adanya kekhawatiran para istri karena dengan demikian akan memberikan peluang lebih besar bagi suami untuk menyeleweng, disamping itu sebagian besar masyarakat masih menempatkan perempuan hanya sebagai obyek dalam masalah seksual maupun reproduksi, karena yang hamil dan melahirkan wanita maka perempuanlah yang harus ikut KB agar tidak hamil. Dari Aspek KIE, rendahnya partisipasi pria antara lain disebabkan oleh :

- Informasi metode KB Pria untuk klien tidak lengkap
- Bias sasaran KIE dan konseling KB & KR lebih banyak diarahkan ke perempuan

- Remaja pria kurang tersentuh KIE dan konseling
- Keraguan provider dengan metode KB Pria
- Data dan analisa kontrasepsi pria masih sangat minim

Ada 3 (tiga) faktor penghambat rendahnya pria menjadi akseptor KB, antara lain :

- Perbedaan peran gender antara suami isteri
- Terbatasnya metode atau cara kontrasepsi yang tersedia
- Kurangnya pengetahuan pria tentang kontrasepsi

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran pria terhadap KB dan KR rendah, antara lain :

- Pendidikan
- Pekerjaan
- Keterpaparan media massa
- Faktor kondisi lingkungan
- Pengalaman menggunakan
- Faktor lainnya

Kegagalan dan keberhasilan merekrut kaum pria dalam ber KB sangat dipengaruhi oleh sikap provider dan petugas KB di lapangan karena dengan sikap proaktif dalam mempromosikan dan responsif bila menemui kaum pria yang membutuhkan pelayanan KB, maka program KB pria akan berjalan optimal. Petugas kesehatan juga jarang melibatkan pria/suami dalam konsultasi kesehatan, terutama dalam perawatan kehamilan dan kelahiran anak. Bahkan, dari 50 dokter yang mengirimkan laporan bulanan, kondom hanya ditawarkan kepada 16 persen klien ibu rumah tangga penderita Penyakit Seks Menular (PSM) (BKBPP Kab. Kampar 2013)

Keterbatasan pilihan metode kontrasepsi pria dan ketersediaan dukungan jaringan pelayanan KB dan KR masih dijadikan alasan penyebab rendahnya kesertaan Pria dalam ber KB. Meskipun dari dua metode KB pria telah tersedia berbagai merek kondom dan telah dikembangkan beberapa teknik vasektomi yang relative lebih baik, namun seringkali menjadi alasan utama yang dikemukakan dari berbagai pihak, mengapa kesertaan pria dalam KB rendah.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi BKBPP Dalam Implementasi Program KB Pria (MOP) di Kabupaten Kampar tahun 2013

Implementasi program KB Pria/MOP bukanlah perkara mudah sebab banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini BKBPP dalam mengimplementasikan program ini. Tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam (Faktor Internal) dan tantangan dari luar (Faktor Eksternal). Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi BKBPP dalam mengimplementasikan Program KB Pria/MOP di Kabupaten Kampar tahun 2013.

1. Faktor Internal BKBPP Kabupaten Kampar

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan suatu instansi dan mempunyai peran untuk mewujudkan tujuan instansi, serta sebagai unsur penggerak suatu instansi, yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah. Hal ini dapat terjadi karena setiap manusia

mempunyai karakteristik yang berbeda dan latar belakang sosial berbeda pula.

Salah satu masalah yang sering dihadapi instansi yaitu masalah kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu seorang pimpinan sebagai pihak yang bertanggung jawab, harus mampu meningkatkan kemampuan kerja bawahannya dan harus mampu mengetahui serta memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan pegawai agar pegawai memiliki kemampuan kerja yang tinggi.

b. Faktor Keterbatasan Anggaran

Anggaran menjadi faktor klasik dan yang selalu dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pada instansi pemerintah. Demikian halnya dengan pelaksanaan program KB Pria oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar. Anggaran BKBPP yang terbatas menjadi indikasi tidak populernya Program KB Pria dan sedikitnya akseptor KB Pria di Kabupaten Kampar. Keterbatasan anggaran menyebabkan sulitnya bagi BKBPP Kabupaten Kampar untuk melakukan rekrutmen tenaga penyuluh KB di Kabupaten Kampar, karena konsekuensi yang dihadapi ketika melakukan perekrutan adalah pemberian honor, insentif dan tunjangan lainnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya peningkatan sarana penunjang kinerja instansi BKBPP dalam mengimplementasikan Program KB dan KB Pria secara khusus. Kondisi minimnya sarana sosialisasi dalam bentuk bilboard, liflet dan iklan merupakan dampak dari minimnya anggaran.

c. Keterbatasan Sarana Penunjang

Keterbatasan sarana penunjang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peran BKBPP dalam mengimplementasikan Program KB Pria di Kabupaten Kampar. Tidak semua fasilitas kesehatan (-RS, Puskesmas dan Klinik) di Kabupaten Kampar memiliki kemampuan memasang akseptor (MOP) bagi pria. Selain itu, belum siapnya tenaga medis juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan KB Pria di Kabupaten Kampar.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program KB Pria oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar adalah kondisi sosio kultural masyarakat Kabupaten Kampar yang belum siap menerima Program KB Pria. KB Pria masih dipandang sebagai sesuatu yang tabu sebagaimana penjelasan di atas, menurut Suhaimi ketidaktahuan mengenai KB Pria menyebabkan program KB Pria tidak sepopuler KB wanita pada umumnya. Selain itu, karena kondisi sosial dan budaya yang ada menyebabkan program KB Pria ini tidak mendapat tempat di mata masyarakat. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya ber-KB saja masih rendah terlebih untuk mensosialisasikan dan melakukan pemasangan KB Pria.

PENUTUP

Berdasarkan urian pada bab pembahasan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan;

1. Bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kampar dalam implementasi

Program KB Pria belum berperan penuh melakukan sosialisasi. Sosialisasi KB pria masih menjadi barang langka, jarang dan sulit ditemui di masyarakat, sehingga metode KB pria seperti *vasektomi* dan *kondom* masih belum sepopuler metode kontrasepsi wanita seperti pil, suntik, atau IUD. Program-program peningkatan KB masih sebatas koordinasi dan sosialisasi KB secara umum sehingga Program KB Pria tidak sepopuler KB wanita pada umumnya.

2. Bahwa faktor keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan Program KB pada umumnya dan pelaksanaan KB Pria secara spesifik. Keterbatasan petugas penyuluh menyebabkan tidak semua warga masyarakat di Kabupaten Kampar mengetahui adanya KB Pria dan dampak positifnya bagi pembinaan keluarga yang berimbang. Keterbatasan sarana menyebabkan tidak terjangkaunya wilayah-wilayah terpencil dalam upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran ber-KB. Keterbatasan anggaran menyebabkan minimnya media sosialisasi dan sulitnya melakukan rekrutmen tenaga penyuluh lapangan atau PLKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Syukur, 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.
- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Muhadjir Darwin. 1995. *Tahap-tahap Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.